

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu. (2017). Optimalisasi Proses Organisasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Esterberg, K.G. dalam Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Haq, M.A., et al. (2021). Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web: Pendekatan Research and Development (R&D). Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, 9(1).
- Hardani, dkk. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Handyaningrat, S. (2021). Administrasi Pemerintahan Umum. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, N.M. (2018). Manajemen Optimalisasi Kinerja. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ilmadi, dkk. (2020). Strategi Optimalisasi Pendidikan. Bandung: CV Alfabeta.
- Kusnandar. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan. Jakarta: Media Sahabat Cendekia.
- Munandar. (2022). Manajemen Administrasi Publik. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Nugroho, R. (2017). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Paparang, R., dkk. (2017). Pengantar Optimalisasi Sistem. Makassar: UNM Press.
- Rahmawan. (2019). Efisiensi dan Optimalisasi Sistem. Semarang: UPT Penerbit Universitas Negeri Semarang.
- Roida, P., & Fitriani. Dalam Ilmadi dkk. (2020). Optimalisasi Media Pembelajaran. Bandung: Alfabeta
- Siagian, S.P. (2021). Fungsi Administrasi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sutha, I.K. (2017). Fungsi Administrasi dalam Organisasi. Bali: Universitas Udayana.

Wibowo. (2016). Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajawali Pers.

Wahab, S.A. (2008). Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-Undangan dan Regulasi:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(SIPD).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan
Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi
SPBE.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan SPBE dan Satu Data
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Penelitian Terdahulu:

Aldira Meilani. (2022). Implementasi Sistem Kearsipan Elektronik di Sekretariat
DPRD Provinsi Jawa Barat.

Ari Wibowo. (2024). Aplikasi E-Risalah Dukung Administrasi Kegiatan Rapat DPRD
Balangan.

Ayu Amarcia Ananda Santoso Wijoyo & Inggit Ayu Arifiyanti. (2021). Sistem
Informasi Risalah Rapat (SIRIPAT) Sekretariat DPRD Kota Tegal.

Farhan Maulana. (2023). Aplikasi Voice To Text Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu

Sungai Tengah.

M. Ridho Saputra. (2023). Aplikasi E-Risalah: Percepatan Kerja Sekretariat DPRD Bontang Kalimantan Timur.

Miftahul Adha. (2023). Pengaruh Kualitas Risalah Rapat dan Kecepatan Penyelesaian Risalah Rapat terhadap Kinerja Anggota DPRD Provinsi Riau.

Rahmat Hidayat. (2021). Analisis Tugas dan Fungsi Bidang Persidangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan.

Rina Oktaviani. (2024). E-Risalah: Pembahasan Pasal-pasal Air Limbah Domestik DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Tiara Khandia Ramadhini. (2023). Kinerja Sekretariat Dewan dalam Memfasilitasi Tugas DPRD Kota Banda Aceh.

Yunita Sari. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Risalah Rapat (SIRIPAT) di DPRD Kota Tegal.